



PELINDUNGAN DATA PRIBADI: KERANGKA REGULASI

MUHAMMAD FAIZ AZIZ

PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK) & SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

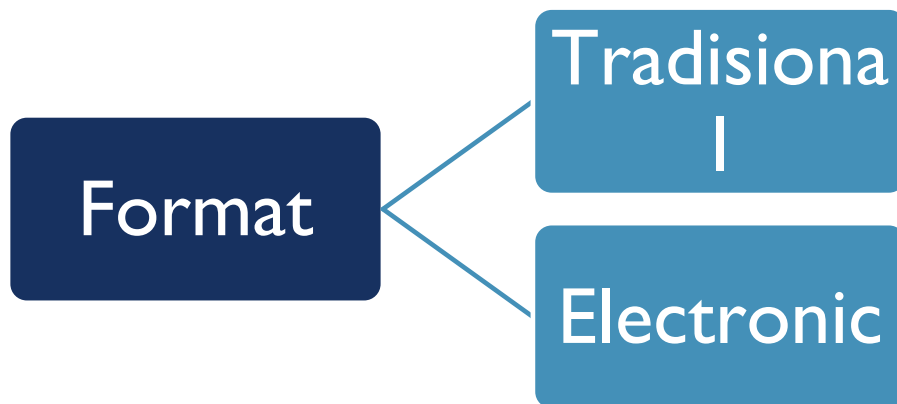
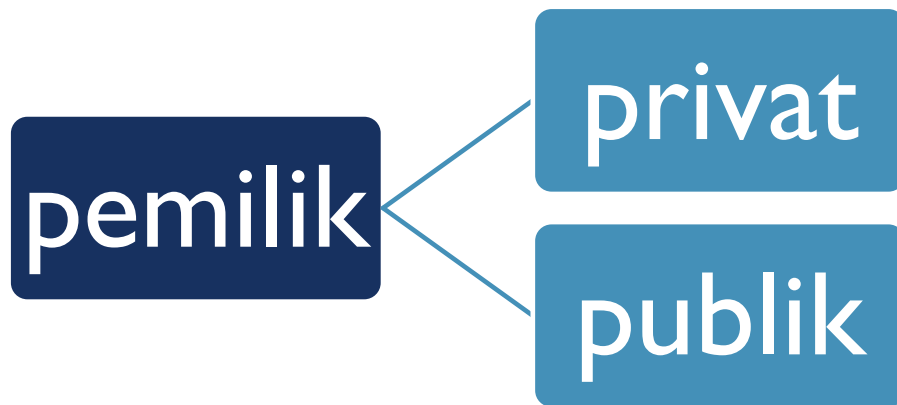
KONTEN



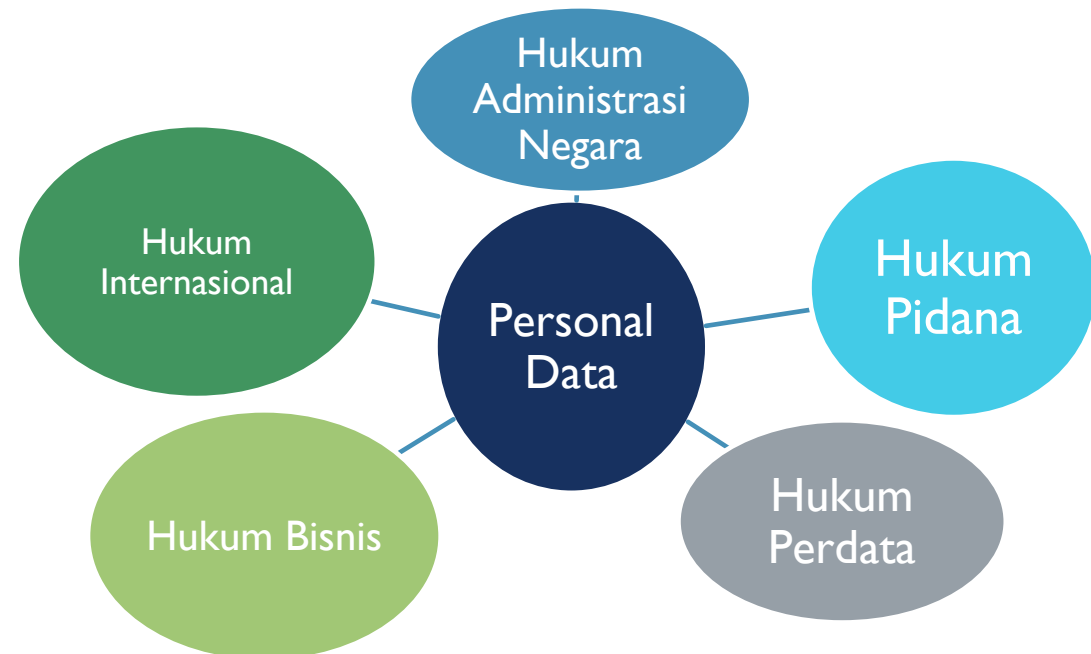
DEFINISI

- “...personal data is an inherent part of an entitlement to personal information.” (Schwartz, 2003)
- Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. (Art. 4 the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)).
- Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. (Pasal 1 angka 22 UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/2013).
- Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. (Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No. 20/2016 Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik).
- Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. (Pasal 1 angka 1 RUU Perlindungan Data Pribadi-Des 2019).

JENIS DATA & DIMENSI HUKUM ATAS DATA



“...privacy and data protection are increasingly **cross-sectoral** and **international issues** . The actions of a regulator in one country can directly affect another, and regulatory co-operation as well as higher level of trust is required between regulators. (Intermedia, 2020).



KERANGKA REGULASI TERKAIT DATA PRIBADI

Kelahiran

Akta Kelahiran (UU Kependudukan)

Anak-anak

Kartu Penduduk Anak (UU Kependudukan)

Dewasa

Kartu Tanda Penduduk (UU Kependudukan)

Perkawinan

Buku Nikah (UU Perkawinan)

Meninggal

Akta Kematian (UU Kependudukan)

UUD 1945
Pasal 28G ayat 1
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Jaminan Sosial (UU SJSN dan BPJS)

Perbankan (UU Perbankan)

Kepesertaan Pendidikan (Peraturan PerUUan Pendidikan)

Paspor (UU Keimigrasian)

Perbankan (UU Perbankan)

Lembaga Keuangan Non Bank (Peraturan PerUUan LKNB)

Data Kesehatan pribadi (Peraturan PerUUan Kesehatan/kedokteran)

Konsumen (UU Perlindungan Konsumen, PP Ecommerce)

Kartu Keluarga (UU Kependudukan)

Perbankan (UU Perbankan)

Lembaga Keuangan Non Bank (Peraturan PerUUan LKNB)

Data Kesehatan pribadi (Peraturan PerUUan Kesehatan/kedokteran)

Konsumen (UU Perlindungan Konsumen, PP Ecommerce)

UU No. 23/2006 jo. UU 24/2013
Adminduk

UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016
ITE

Permenkominfo 20/2016 PDP

UU 14/2008
Keterbukaan Informasi Publik

KERANGKA REGULASI TERKAIT DATA PRIBADI: PENYELESAIAN SENGKETA/KELUHAN

Perlindungan Konsumen	Sektor Jasa Keuangan	Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	Transaksi E-Commerce	Keperdataan
• BPSK • Pengadilan Negeri	• Internal Dispute Resolution • External Dispute Resolution (Peradilan atau LAPS)	• Musyawarah mufakat • Alternatif penyelesaian sesuai regulasi	• Internal Dispute Resolution (Online Dispute Resolution) • External Dispute Resolution (Peradilan atau LAPS)	• Peradilan
UU No. 8/1999 Perlindungan Konsumen	• UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 Perbankan • UU 40/2014 Asuransi • UU No. 21/2011 OJK • POJK 1/2013 Pelindungan Konsumen SJK • POJK 1/2014 LAPS	• Permekominfo 20/2016 Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	• PP 80/2019 E-Commerce	• HIR/RBG • Perma 1/2019 E-court

PARADIGMA BERKEMBANG



Data Pribadi
sebagai data
personal individual

Data pribadi
sebagai property
yang dilekatkan
kepemilikan

Data pribadi
menjadi data
public Ketika
teragregat

SEBAIKNYA KE DEPAN



Personal data illustration. ANTARA/shutterstock.
<https://en.tempo.co/read/1206578/kominfo-preps-draft-bill-on-personal-data-protection>

- Pengaturan dengan kombinasi paradigma.
- Pengaturan memperhatikan soal lintas sektor;
- Pengaturan memperhatikan soal lintas batas dan elaborasi yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa;
- Pengaturan memperhatikan tautan antar hukum internal dalam penyelesaian sengketa;
- Pengaturan mengelaborasi soal kerja sama antara regulator.



THANK YOU

muhammad.aziz@pshk.or.id; or

muhammad.aziz@jentera.ac.id